

PENGARUH KEBIJAKAN POLITIK ETIS TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Shelita Bunga Apriyana¹, Siti Komariyah², Yus Novriyanto³

Program Studi Pendidikan Sejarah

^{1,2,3}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

2288190045@untirta.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan program untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengurangi jumlah buta huruf yang berdampak baik pemerintah Belanda dan rakyat pribumi. Pada masa colonial Belanda Pendidikan formal sangat susah untuk masyarakat pribumi baik kaum priyayi maupun masyarakat biasa. Setelah diterapkan politik etis pada awal abad 20 dan lambat laun semakin banyak sekolah formal yang didirikan di Hindia Belanda, dampak dari adanya kebijakan politik etis ini adalah melahirkan para intelektual yang akhirnya akan menyadari bahwa bangsanya sedang dalam penjajahan dan menginginkan perubahan. Rumusan masalah yang diangkat adalah 1. Bagaimana awal kebijakan politik etis? 2. Bagaimana sistem Pendidikan di masa colonial? 3. Bagaimana Lembaga Pendidikan masa colonial? Dari rumusan masalah yang diangkat, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana awal mula kebijakan politik etis, bagaimana system Pendidikan masa colonial dan mengetahui Lembaga Pendidikan pada masa colonial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan sumber sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah.

Kata kunci: *Kebijakan Politik Etis, Perkembangan Pendidikan*

Abstract

Education is a program to improve the quality of Human Resources and reduce the number of illiteracy which has a good impact on the Dutch government and the indigenous people. During the Dutch colonial period, formal education was very difficult for indigenous people, both priyayi and ordinary people. After implementing ethical politics in the early 20th century and gradually more formal schools were established in the Dutch East Indies, the impact of this ethical policy was to produce intellectuals who would finally realize that their nation was in freedom and wanted change. The formulation of the problem raised is 1. How did the ethical political policy begin? 2. How was the education system in the colonial period? 3. How was the educational institution during the colonial period? From the formulation of the problems raised, the aim is to find out how the beginning of ethical ethical policies was, how the colonial education system was and to know the educational institutions in the colonial period. The research method used is a qualitative method using secondary sources such as books and scientific journals.

Keywords: *Ethical Political Policy, Educational Development*

Pendahuluan

Sebuah bangsa mengalami kemajuan ataupun kemunduran pada masa sekarang menuju masa yang akan datang ditentukan oleh bagaimana kualitas dari generasi selanjutnya yang terbentuk. Terbentuknya generasi muda yang berkualitas tidak terlepas dari bagaimana adanya pendidikan, bagaimana pendidikan yang ada pada bangsa tersebut membentuk para generasinya yang membawa akselerasi menuju kemajuan atas bangsa tersebut. Kemajuan dalam aspek pendidikan sangat krusial untuk menanamkan intelektual hingga karakter generasi penerus bangsa yang akan membawa bangsa kepada kemajuan atau kemundurannya. Hal tersebut juga dikuatkan seperti apa yang disampaikan oleh, Rinehart dalam Daulat P. Tampubolon (2001: 344) menyatakan: *Lied to young people, telling them they are the future of our country and our society. How can they build the future when we give them nothing whit which to build it? All we do is to hand over the responsibility with it we give* (generasi muda telah dibohongi bertahun-tahun lamanya. Kerap kali dikatakan bahwa merekalah generasi muda sebagai masa depan bangsa serta Negara, akan tetapi kita tidak pernah memberikan mereka sebuah hal yang dapat membangunnya. Yang diberikan hanya sebuah tanggung jawab yang diakibatkan atas kerusakan sosial, politik, keuangan hingga lingkungan). Apa yang disampaikan oleh Rinehart tersebut menjadi gambaran yang begitu jelas bahwa pendidikan sangat penting, upaya pencerdasan menjadi hal yang urgensial untuk diberikan kepada generasi penerus bangsa sebagai upaya penghapusan kebodohan yang menyebabkan belenggu kesengsaraan bagi bangsa.

Apabila ditinjau dari kacamata sejarah, bagaimana Bangsa Indonesia dapat memperoleh kemerdekaan tidak terlepas dari adanya pendidikan yang didapatkan yang kemudian terbentuklah tokoh-tokoh intelektual bangsa yang mempropagandakan kemerdekaan dan membuka belenggu hitam kebodohan atas penjajahan yang ada. Pendidikan yang didapatkan bangsa Indonesia meskipun masih sangat tidak merata setidaknya memberikan dampak positif. secara formal pendidikan di Indonesia telah ada pada zaman yang tidak terlepas dari adanya kebijakan politik etis pada saat itu yang salah satu fokusnya adalah edukasi. Perkembangan pendidikan semasa colonial hingga saat ini mengalami perkembangan oleh karena itu mempelajari sejarah pendidikan menjadi hal yang cukup penting sebagai refleksi bagaimana proses pendidikan yang ada pada bangsa ini sejak masa kolonial, perkembangannya serta pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa ini.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian sebagai sarana yang mendukung dalam penulisan jurnal penelitian ini secara baik dan sistematis. Penulisan secara sistematis ini mempermudah para pembaca jurnal ini membaca dengan sangat baik dan mudah paham dengan apa yang disampaikan penulis dalam jurnal penelitian ini, terkait Bagaimana upaya sekolah meningkatkan mutu dalam manajemen sekolah dengan membuat pendekatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Penulis menggunakan sebuah metode yaitu metode kualitatif yang berhubungan dengan sumber sumber seperti buku, jurnal-jurnal, serta artikel

ilmiah, dan lain lain yang bersifatnyailmiah serta data yang memiliki kredibilitas yang baik (Manab, 2015). Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang sudah berkembang alam dan sudah banyak diimplementasikan di dalam berbagai bidang keilmuan seperti bidang ilmu sosial, bidang kebudayaan, bidang psikologi, bidang komunikasi serta dalam bidang pendidikan (Nugrahani & Hum, 2014). Kemudian penulis juga menggunakan teknik pengkajian isi jurnal atau sumber yang diperoleh oleh penulis, didalam mengkaji sumber ini penulis menganalisis serta memahami isi dokumen tersebut dengan hati-hati, teliti dan kritis agar pembaca dapat memperdalam isi serta makna dari pembahasan jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Kebijakan Politik Etis Terhadap Pendidikan

Awal abad ke 20 Diterapkannya Politik Etis (Etische Politiek), politik etis dianggap sebagai sebuah hal yang membuka pandangan berbeda mengenai pendidikan tetapi ketika dirumuskan, menimbulkan pro dan kontra di kalangan intelektual, politisi, dan ulama Belanda (lingkaran gereja). Meski ada perbedaan pendapat di parlemen Belanda, ada juga pihak yang mendukung program ini. Mereka menganggapnya sebagai "kemanusiaan" atau bahkan "kewajiban moral" kepada bangsa Indonesia. Dengan pro dan kontra, Kode Etik sebenarnya mulai berlaku setelah Ratu Wilhelmina berpidato di depan Jenderal Staten pada tahun 1901. Sebelum tahun 1901, politik Belanda hanya mementingkan tuntutan ekonomi, dan eksploitasi kekayaan Indonesia sama sekali tidak mempertimbangkan rakyat Indonesia. Dalam pidato Ratu Wilhelmina dimungkinkan untuk menyeimbangkan unsur penjajahan dengan unsur "kewajiban moral". Penjelasan Van Deventer tentang politik etis dikonseptualisasikan dalam hal irigasi, pendidikan dan migrasi. Dalam buku Miftakhudin Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan untuk Hegemoni (2019), pendidikan awal hanya ditujukan pada bangsawan yang diselenggarakan oleh raja dan wali di sekitar keraton dan Pesantren.

Namun, kolonialisme dan intervensi politik Belanda menyebabkan pembangunan sekolah. Sekolah yang dibangun seperti SD adalah Meer Uitgebreid Lagere School Onderwijs (MULO) untuk SMP dan Algemeen Metdelbare School (AMS) untuk SMA. Berikutnya adalah Technical Hoogere School (THS) Bandung, School tot Opleiding Van Indien Artsen (STOVIA), Medical School and Legal Hoogere School (RHS), atau Fakultas Hukum Batavia. Pendirian sekolah-sekolah ini didasarkan pada kebutuhan Belanda akan staf sipil, medis dan militer. Sejak itu, hanya pria bangsawan yang diizinkan bersekolah. Di era pergerakan nasional, ia mulai mengabdikan dirinya untuk pendidikan secara mandiri dan memulai sekolah untuk masyarakat adat. Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap nikmat pemerintah Belanda. Kelas enam, kelas tiga, dan kelas tiga adalah contoh warisan tak benda pemerintah kolonial Belanda yang berdampak positif bagi bangsa Indonesia dengan membangun sekolah-sekolah dalam implementasi kebijakan timbal balik pemerintah Hindia Belanda.

Beberapa di antaranya adalah: Meningkatkan pendidikan formal Berkurangnya jumlah buta huruf Pribumi terdidik dapat bekerja secara profesional untuk Hindia Belanda Munculnya organisasi pergerakan nasional Keberadaan sekolah sangat penting dalam pembangunan Berperan Memperluas sistem pendidikan Hindia Belanda. Website Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kemendikbud) melaporkan bahwa pendidikan adalah program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan tingkat buta huruf. Anda akan dibayar dengan buruk. Efek positif yang dicapai adalah jangka panjang bagi penduduk Indonesia. Tempat orang terpelajar dan orang terpelajar melahirkan. Kelompok-kelompok ini mengancam pemerintah Belanda. Dengan munculnya organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarikat Islam. Bahkan sangat membantu perkembangan dan perluasan dunia pendidikan di Hindia Belanda. Pada tahun 1900, sekolah didirikan untuk Priyayi dan masyarakat umum dan didistribusikan hampir merata di seluruh wilayah. Siswa Bumiputera tidak memperhatikan suku, ras, agama, atau perbedaan. Sebagai Bumiputera yang tertindas, mereka merasa lebih bersama. Perjuangan dilakukan selama gerakan nasional yang dimobilisasi oleh para tokoh intelektual.

Sistem Pendidikan Di Zaman Belanda

Kebijakan di bidang Pendidikan yang diterapkan Kolonial Belanda memiliki Ciri – ciri sebagai berikut:

- (1) Gradualisme, adalah suatu kondisi yang sengaja diperlambat oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk membawa perubahan di bidang Kependidikan.
- (2) Dualisme, merupakan penekanan pembeda yang sangat jelas antara Pendidikan untuk Kolonial Belanda dan pribumi.
- (3) Kontrol pusat yang kuat, merupakan semua kebijakan yang diterapkan, dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal
- (4) Tujuan yang terbatas, artinya bahwa peran didirikannya sebuah Lembaga Pendidikan digunakan hanya untuk melahirkan para pegawai dengan gaji yang rendah.
- (5) Prinsip konkordansi, yaitu mempertahankan bahwa Lembaga Pendidikan seperti sekolah-sekolah yang ada di Indonesia memiliki kurikulum dan standar kualitas yang sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Belanda.
- (6) Tidak ada rencana pendidikan yang sistematis, dengan kata lain setiap sekolah berdiri sendiri, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena tidak ada hubungannya dengan organisasi atau sekolah lain.

Kebijakan pendidikan kolonial Belanda di Indonesia berubah seiring dengan perubahan Gubernur Jenderal yang menjabat saat itu, berikut beberapa kebijakan yang diterapkan ketika Gubernur Jenderal berkuasa :

1. Willem Rooseboom (1899 – 1904)

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Willem Rooseboom, ia mengizinkan dan membuka pelatihan pusat berbahasa Belanda agar penggunaan bahasa Belanda semakin dikenal di kalangan rakyat pribumi yang tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih mudah dari Pendidikan pribumi ke Pendidikan Barat yang nantinya akan dipekerjakan di lembaga milik pemerintah colonial Belanda.

2. Johannes Benedictus van Heutsz (1904 – 1909)

Pada masa pemerintahannya, Ia berusaha untuk menyebarkan pendidikan dalam jangkauan yang lebih besar, terutama dengan mencari berbagai jenis sekolah yang murah dan sederhana. Van Heutz telah mendirikan sekolah yang tepat untuk rakyat pribumi yaitu Sekolah Desa (Volkschool). Menurutnya, jenis sekolah ini merupakan yang tepat karena sekolah ini terjangkau dan dapat didirikan bersama, tanpa dana dari pemerintah colonial, selain itu, sekolah telah menjadi bagian dari masyarakat yang menganggapnya sebagai milik mereka sendiri, dan sekolah yang melaksanakan program ini tidak akan mengeluarkan para murid dari kehidupan pertanian desa mereka.

3. Alexander Willem Frederik Idenburg (1909 – 1916)

Gubernur Jenderal A.W.F Idenburg mengeluarkan kebijakan yaitu mengadakan konsolidasi sekolah yang awalnya independent dan tidak terkait menjadi satu system yang sistematis. Pada tahun 1910 ia mulai menyadari bahwa jika tidak ada konsolidasi antara sekolah untuk anak – anak Bumiputera maka tidak akan berjalan dengan baik. Untuk menindak lanjuti rencananya tersebut, ia mengirimkan surat pada Menteri Kolonial.

4. Johan Paul van Limburg Stirum (1916 – 1921)

Pada masa pemerintahannya, ia mendirikan Volksraad (Majelis Rakyat) dan Technische Hoogeschool te Bandoeng yang nantinya akan menjadi cikal bakal Institut Teknologi Bandung.

5. Dirk Fock (1921 – 1926)

Pada masa pemerintahannya, ia mengurangi peran Penasihat bisnis pribumi, sebuah organisasi penting pada kebijakan politik etis. Di sisi lain, peran Polisi Rahasia (Algemeene Recherchedienst) semakin berkembang. Pada masa Pemerintahannya dipandang sebagai akhir dari cita-cita Politik Etis.

6. Andries Cornelis Dirk de Graeff (1926 – 1931)

Pada masa pemerintahannya terjadi Perimbangan anggaran belanja (Balanced Budget) dan dia juga mempertahankan hal tersebut meskipun akan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat Kesehatan, Pendidikan dan lain - lain. Pada masa pemerintahannya didirikan Geneskundige Hoge School (GHS) atau Sekolah Tinggi Kedokteran pada tahun 1928.

7. Bonifacius Cornelis de Jonge (1931 – 1936)

Pada masa jabatannya berlangsung tingkat kesejahteraan rakyat semakin menurun, karena pemerintah mengurangi upah buruh, menyebabkan pengangguran, kemiskinan, kelaparan dan masih harus menanggung beban pajak yang berat untu mengurangi biaya produksi, juga kebebasan berkumpul sangat dibatasi, tetapi kebijakan yang ada justru melindungi kepentingan para pengusaha dan kelompoknya sendiri tetap ada.

Pada masa pemerintahannya, Ia mendirikan Onderwijs Ordonantie yang juga dikenal sebagai Ordonansi Sekolah Liar pada tanggal 17 September 1932. Ia juga mengeluarkan peraturan Toezicht Ordonantie (Ordonansi Pengawasan) pada tanggal 1 Oktober 1932. Tahun 1934, Ia mengeluarkan peraturan lain yang disebut Onderwijsverbod (larangan mengajar).

8. Alidius Warmoldus ambertus Tjarda van Starckenborgh Stachouwer (1936 – 1942)

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal A.W.L.T van Starckenborgh Stachouwer, sifat kolonialisme yang konservatif tetap dipertahankan, yaitu masyarakat yang diberi ciri dualisme, yakni posisi kelompok yang dominan condong kolonial tetap dipertahankan sedangkan kelompok

pribumi tetap dibatasi haknya dan dipandang sebagai negara yang belum matang untuk mandiri. Indonesia yang semula negara polisi (*Politie Staat*) di bawah de Jonge berubah menjadi negara pegawai (*Beambten Staat*) di bawah Tjarda.

Lembaga Pendidikan Belanda

Pendirian sekolah merupakan prinsip dasar pelaksanaan politik etis. Karena politik etis menjadi politik yang menarik ketika didengar oleh semua pihak yang menentang pemerintah kolonial dari konteks sosial dan politik, terutama masyarakat pribumi. Kebijakan etis tersebut sebenarnya merupakan sebuah kebijakan Belanda untuk melanjutkan eksploitasi terhadap negara Indonesia sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial untuk memperkuat eksploitasi kolonial. Pemerintah kolonial Belanda telah menyediakan pendidikan untuk memelihara atau menciptakan hubungan internasional yang lebih besar dari pada di tingkat lokal atau daerah. Pemberian fasilitas sekolah kepada kaum pribumi ini pendidikan merupakan sebuah pengusahaan untuk melawan pendidikan Islam yang mulai berkembang, yang dianggap berbahaya pada saat itu. Pendidikan yang di berikan oleh belanda, membuat perubahan yang sanagt besar terhadap kaum pribumi tersutama dari segi politik dan ekonomi, yang membawa kontraproduktif kepada pemerintah kolonia belanda karena berbagai kelompok terpelajar di Indonesia menjadi salah satu pendorong peningkatan nasionalisme Indonesia.

Pada masa penjajahan kolonial dilaksanakan beberapa kebijakan yaitu persatuan dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini merupakan prinsip yang bertujuan untuk menjaga sekolah pada tingkat yang sama dengan sekolah yang berada di Belanda. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh rakyat Belanda, khususnya para bangsawan dan pejabat pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pemindahan siswa-siswa Hindia Belanda ke sekolah-sekolah negeri Belanda. Kemudian sekolah-sekolah Belanda ini memiliki kurikulum yang sama dari tiap tingkat yang sma dengan sekolah di belanda, karena beberapa pengawas telah ditugaskan untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah Hindia Belanda mencapai kualitas dan standar yang sama dengan sekolah-sekolah Belanda.

Ketika peran dan pengaruh etis meletakkan dasar bagi tahap pendidikan pada saat itu, pemerintah menetapkan kebijakan tentang pemikiran pertama. Artinya, pendidikan pertama Barat adalah bahasa pengajaran harus berbahasa Belanda di setiap sekolah. Tujuan pendidikan golongan pribumi disesuaikan dengan kebutuhan yang mereka gunakan serta melihat golongan dari masyarakat tersebut. Maka karena itu, gaya pendidikan dan persekolahan pemerintah kolonial ditempuh dengan dua cara. Di masa lalu, ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan profesional dan personel berkualifikasi tinggi untuk tujuan komersial dan ekonomi. Jalur kedua diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kelas menengah dan kelas kurang terdidik. Pendidikan pada zaman Belanda diatur oleh pemerintah pusat belanda, termasuk guru dan orang tua yang tidak memiliki pengaruh terhadap kewajiban atau kebijakan pendidikan. Bagian kurikulum sekolah, buku pelajaran, persyaratan guru, jumlah sekolah seni di sekolah, dan segala hal yang berkaitan dengan pengangkatan guru diputuskan oleh Pemerintah Pusat Kolonial Belanda. Mengenai pembangunan dan pendirian fasilitas sekolah, pemerintah kolonial Belanda

memprioritaskan daerah-daerah tertentu dengan aliran ekonomi yang sangat kuat, seperti Batavia, Semarang dan Surabaya, karena mereka akan menjadi pusat ekonomi saat itu.

Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan dan sekolah dibagi menjadi beberapa jenis, mulai dari tingkat pendidikan paling dasar hingga tingkat pendidikan tertinggi dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pendidikan, dan sekolah rendah dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan.

- *European Legere School (ELS)*

Sekolah itu diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa dan anak-anak bangsawan dari timur. Masa sekolah di ELS adalah 3 tahun. Pada tahun 1907 masa studi di ELS diubah menjadi 7 tahun. Mata pelajaran di sekolah ini adalah menulis, membaca, matematika, bahasa Belanda dan ilmu bumi.

- *Hollandsch Inlandsche School (HIS)*

Hollandsch Inlandsche School dibagi menjadi dua bagian: HIS negeri dan subsidi. Sekolah ini memiliki masa belajar tujuh tahun dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar untuk belajar. Bagi masyarakat pribumi, sekolah ini adalah cara utama untuk membantu meningkatkan status sosial mereka didalam masyarakat. Awalnya sekolah itu ditujukan hanya untuk bangsawan elit atau diizinkan, tetapi menjadi sekolah yang terbuka untuk anak-anak kelas bawah dan di keranakan adanya politik etis.

- *Hollandsch - Chineesch School (HCS)*

Sekolah ini didirikan pada tanggal 5 November 1930 di Surabaya dan merupakan sekolah pertama untuk anak-anak di China. Didirikan oleh Asosiasi Ho Tjong Hak Kwan, yang mendirikan sekolah dasar ini di keturunan pemukiman Cina. Sekolah dasar terdiri dari 142 siswa dan 6 guru, dan bahasa yang diajarkan atau diajarkan oleh sekolah tersebut adalah Kuo Yu, bahasa resmi Tiongkok. Hal ini terbuka untuk anak-anak timur asing, Cina. Didirikan pada tahun 1908, sekolah ini memiliki masa studi tujuh tahun dan bahasa pengajarannya adalah bahasa Belanda. Sekolah ini mengajarkan membaca dan menulis, berbicara, matematika, menyanyi dan melukis dalam bahasa Belanda.

- *Meer Uitgebreid Leger Onderwijs (MULO)*

Sekolah ini berdasarkan Sistem Sekolah Kolonial atau PKB. Sekolah Mulo sendiri merupakan sekolah yang tergolong sekolah dasar lanjutan, yang merupakan lanjutan dari sekolah dasar yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Sekolah Mulo sendiri dapat diterima pada jenjang pendidikan menengah yang pertama kali didirikan pada tahun 1916 atau sekarang menjadi Sekolah Menengah Pertama. Sekolah Mulo mengajarkan membaca, bahasa Belanda, aritmatika, sejarah Belanda dan kolonialnya, sejarah dunia, geografi, sains, bahasa Inggris dan Jerman, dan menggambar. Kedua, ada perbedaan antara kelas 1 dan kelas 3. Dengan kata lain, berbeda dengan waktu belajar yang diadakan di Sekolah Mulo. Bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan waktu mata pelajaran pada mata pelajaran yang dicapai di Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3. Misalnya, Kelas 3 memiliki waktu jam pelajaran perhitungan yang lebih lama untuk Kelas 1 dan 2, dan sebagian besar waktu dalam bahasa Belanda dan Inggris lebih banyak di kelas 1 dan 2.

SIMPULAN

Politik etis dianggap sebagai sebuah hal yang membuka pandangan berbeda mengenai pendidikan tetapi ketika dirumuskan, menimbulkan pro dan kontra di kalangan intelektual, politisi, dan ulama Belanda (lingkaran gereja). Efek dari adanya kolonialisme dan intervensi politik Belanda menyebabkan pembangunan sekolah. Sekolah yang dibangun seperti SD adalah Meer Uitgebreid Lagere School Onderwijs (MULO) untuk SMP dan Algemeen Metdelbare School (AMS) untuk SMA. Kelas enam, kelas tiga, dan kelas tiga adalah contoh warisan tak benda pemerintah kolonial Belanda yang berdampak positif bagi bangsa Indonesia dengan membangun sekolah-sekolah dalam implementasi kebijakan timbal balik pemerintah Hindia Belanda. Beberapa di antaranya adalah: Meningkatkan pendidikan formal Berkurangnya jumlah buta huruf Pribumi. Lalu, Van Heutz mendirikan sekolah yang cocok untuk Bumiputera yaitu Sekolah Desa (Volkschool). Menurut Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heutsz, ini adalah jenis sekolah yang dianggap paling tepat. Pendirian sekolah merupakan prinsip dasar pelaksanaan politik etis. Karena politik etis menjadi politik yang menarik ketika didengar oleh semua pihak yang menentang pemerintah kolonial dari konteks sosial dan politik, terutama masyarakat pribumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Galih, Rangga Dhimas. 2017. *Penerapan Politik Etis Di Surabaya Tahun 1911-1930*. Jurnal Avatara, Pendidikan Sejarah Vol. 5 No. 3 Okt 2017. Universitas Surabaya.
- Gunawan, A. 1986. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Manab, H. A. (2015). *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. repo.iain-tulungagung.ac.id.
[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10156/1/Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10156/1/Penelitian_Pendidikan_Pendekatan_Kualitatif.pdf)
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. In Solo: Cakra Books. digilibfkip.univetbantara.ac.id. <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>
- Pramudiya, Muhammad Gusti, Dewi Salindri. 2015. *Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942*. Jurnal Publika Budaya Vol.1 (3) Maret 2015 Hal 20-34. Program Studi Ilmu Sejarah, Fak Sastar, Universitas Jember.
- Sultani, Magribi Ibrahimsyah Zofrano, dkk. 2020. *Perkembangan Dan Pelaksanaan Pendidikan Zaman Kolonial Belanda Di Indonesia Abad 19-20*. Jurnal Aretefak Vol.7 No. 2 Sep 2020 Hal 91-106. Universitas Galuh.
- Sumardi. Nurul Umamah. *Fajar Shiddiq Sofyan Heru. 2014. Sistem Pendidikan Kolonial Belanda Di Indonesia Tahun 1900 – 1942*. Artikel Ilmiah Mahasiswa.